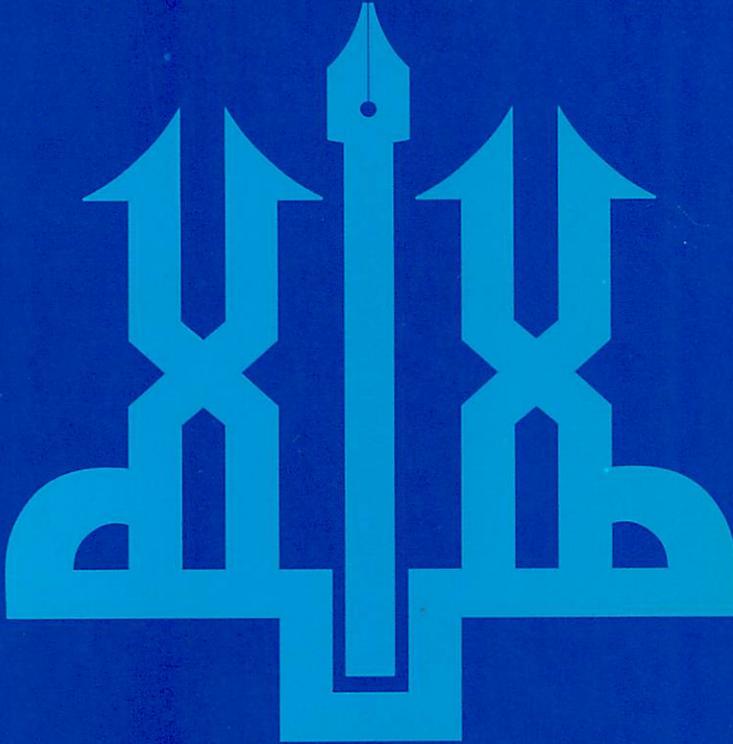


Vol. VI, No. 2, Agustus 2004

ISSN 1411-1373

QUALITA AHSANA

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU KEISLAMAN



Biyanto, Muzaiyanah, Sukarma, Bambang Subandi,
Lilik Nofijantie, Kusaeri, Rizma Fithri

Diterbitkan Oleh :
Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel

Qualita Ahsana

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU KEISLAMAN

TERAKREDITASI BERDASARKAN SK DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS
NO. 52/DIKTI/KEP/2002 Tanggal: 12 Nopember 2002

Pemimpin Redaksi:

H. A. Saiful Anam

Wakil Pemimpin Redaksi:

Bambang Subandi

Sekretaris Redaksi:

*H. Fachrur Rozie Hasy
Syaikhul Amin*

Penyunting Ahli:

*H. Amin Abdullah
H. Suroso Imam Zadjuli
Sunarto
Muh. Nuh
H. Arief Furqan
H. Syaifiq A. Mughni*

Penyunting Pelaksana:

*Achmad Zaini
Saiful Jazil
Biyanto
Jeje Abdul Rozak
Amiq
Masdar Hilmy
Khoirun N'iam*

Sekretaris:

*Moh. Yazid
Samsoel Bahari
Ruhayati
M. Saeful Bahar
Amirullah
Abd. Halim
Imampuri*

QUALITA AHSANA diterbitkan oleh Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel
tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember
dan Rektor IAIN Sunan Ampel sebagai pelindung

Alamat Penerbit Redaksi:

Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel Jl. A. Yani 117 Surabaya 6023 7
Telp. (031) 8410298 ps. 34 Fax. (031) 8413300
E-Mail: sunanampel@surabaya.wasantara.net.id.
Homepage: <http://www.geocities.com/HotSprings/6774>

Qualita Ahsana

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU KEISLAMAN

DAFTAR ISI

**Sufisme Kota (Studi Tentang Kecenderungan Meningkatnya
Kehidupan Religius-Sufistik Masyarakat Muslim Perkotaan)**

Biyanto (1)

**Konsepasi Tasawuf dalam Tarekat Shadhiliyah (Studi Kasus di
Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro)**

Muzaiyanah (14)

**Partisipasi Ahl al-Tariqah dalam Politik Nasional (Kasus
Tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah Rejoso Jombang Jawa
Timur)**

Sukarma (28)

**Efektifitas Ziarah Kubur Sebagai Media Dakwah dalam
Membentuk Kepribadian Muslim**

Bambang Subandi (45)

**Efektifitas Kebijakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
Program S-1 IAIN Sunan Ampel Surabaya**

Lilik Nofjantie (60)

**Analisis Kebutuhan dan Faktor Kendala dalam Pembelajaran
Statistik di Fakultas Tarbiyah**

Kusaeri (73)

**Hubungan Antara Minat Menjadi Dosen dengan
Profesionalisme Dosen Tetap IAIN Sunan Ampel**

Rizma Fithri (87)

PARTISIPASI AHL AL-TARĪQAH DALAM POLITIK NASIONAL

**(Kasus Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah
Rejoso Jombang Jawa Timur)**

Sukarna¹

Abstract: This study attempts to uncover the potential factors underlying the political participation of the adherents of *Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah* Rejoso, Jombang and the response of the society. As a descriptive qualitative study, the data were collected using participant observation and in-depth interview with the prominent figures of the *tarekat* members, and analyzed using a sociological-political approach. The finding is that most of them state to adhere to a certain political party, thus having a better access to political elites either in local or in central office. That, consequently, causes not only the degradation of society's appreciation towards the *tarekat* instructors, but also conflict among the *tarekat* followers.

Kata Kunci: Tarekat, Politik, dan *Qadiriyyah Wa Naqshabandiyah*

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Adab IAIN Surabaya

Pendahuluan

Tarekat² merupakan wahana peningkatan olah-spiritual melalui kesibukan menenggelamkan diri dalam amalan ukhrawi; ritual, dan dzikir, tetapi para anggota-pengamal (*ahl al-tariqah*) seringkali memanfaatkannya sebagai media yang cukup efektif untuk mengaktualisasikan tanggung jawab lingkungan sosial politik mereka. Di bawah model kepemimpinan kharismatik, basis dukungan massa fanatik, serta latar belakang sistem gagasan (*system of idea*) unik mengenai kesucian batin dan kesalehan perilaku, tarekat membentuk visi politik kenegaraan yang khas hingga ia sangat potensial memainkan suatu “aktivitas politik”³ secara signifikan. Bahkan terdapat tarekat-tarekat tertentu yang keberadaannya justru dihubungkan dengan kadar kekuatan politik yang dimilikinya.

Karena itu, penganut tarekat menjalani kehidupan asketis (*zuhd*) sekaligus tetap bergairah mengerjakan kegiatan-kegiatan sekular yang bersifat duniawi, termasuk terlibat secara intensif dalam percaturan politik, apalagi di masa modern kini tatkala hampir dipastikan tidak ditemukan satu lembaga atau perseorangan pun dapat melepaskan diri dari dampak berbagai tahapan kegiatan politik. Setidak-tidaknya salah satu dari proses politik seperti mobilisasi kekuatan massa, manipulasi sumber kekuasaan, ataupun tawar menawar politik, mempengaruhi individu dan organisasi dalam waktu-waktu tertentu. Pada kenyataannya, implementasi keterlibatan kaum tarekat dalam konteks politik tersebut dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan berupa dukungan kepada penguasa politik/ pemerintah, yang diwujudkan melalui bentuk-bentuk sikap akomodasionis, mempengaruhi politik dalam arti memperkuatnya, membuat pernyataan dukungan bagi kebijakan pemerintah, dan sebagainya.⁴

² Dalam bahasa Indonesia, perkataan “tarekat” (diambil dari bahasa Arab *al-Thariqah*, literal; anak jalan, metode) digunakan untuk menunjuk pada suatu rumusan doktrin, cara, dan teknik tertentu yang diyakini bisa membawa pada pencapaian sasaran *tasawuf*, serta organisasi kelembagaannya (*taifah*) sekaligus.

³ Yang dimaksud dengan terma “aktivitas politik” ialah segala bentuk tindakan (praktek) yang ditujukan untuk menggunakan atau mempengaruhi kekuasaan negara dan pemerintahan. Christopher Llyod (ed.), *Social Theory and Political Practice* (London: Wolfson, 1983), 3.

⁴ Bentuk keterlibatan masyarakat lainnya adalah; 1. menunjukkan (koreksi) kelemahan penguasa dengan harapan supaya mereka mau mengubah atau memperbaiki kekurangannya itu, yang diwujudkan dalam bentuk petisi, resolusi, mogok, demonstrasi, protes, dan lain-lain. Dan 2. partisipasi yang bermakna tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga terjadi

Demikian pula tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah* (TQN) yang berpusat di Rejoso Jombang Jawa Timur. Selain menekankan seperangkat ajaran dan pengalaman keagamaan yang eksklusif, tarekat juga mendukung keterlibatan aktif para anggotanya dalam praktek-praktek duniawi di panggung politik kekuasaan. Pada periode yang lampau di masa Orde Baru, keberadaan tarekat ini senantiasa dikaitkan dengan afiliasinya yang sangat kental kepada kekuatan politik nasional. *Performance* seperti itu tentu secara sosiologis dan keagamaan menarik untuk dikaji. Terutama agar diperoleh gambaran dan analisa yang lebih objektif mengenai persoalan mendasar seputar bagaimana komunitas yang selalu mengaku menyandarkan seluruh aktivitas kehidupannya, termasuk di dalamnya kegiatan politik, atas nama Tuhan dan nilai-nilai kerohanian ini dapat mereproduksi pola-pola dan prespektifnya yang khas tersebut kepada pengalaman-pengalaman dunia empirik (baca: politik) mereka.

Fokus Penelitian

Secara umum penelitian diarahkan untuk mencari gambaran mengenai aktifitas politik dari penganut TQN Rejoso. Kemudian akan dikembangkan dengan afiliasi tarekat-politik tersebut, sehingga rumusan masalahnya dapat dirinci sebagai berikut.

1. Faktor-faktor apa sajakah yang potensial bagi timbulnya partisipasi politik?
2. Bagaimana persepsi dan tanggapan masyarakat, baik internal anggota maupun umum, terhadap kasus keterlibatan tersebut?

Metode Penelitian

Oleh karena persoalan yang dibahas itu berhubungan dengan sebuah proses dan pemaknaan, maka bentuk dan strategi penelitian yang dianggap *compatible* secara metodologis adalah model penelitian *deskriptif kualitatif*.⁵ Bentuk ini diharapkan mampu mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan sifat deskripsi yang bernuansa, tidak sekedar menggali pernyataan, jumlah, dan frekwensi dalam hitungan saja. Data kualitatif

perubahan regim atau sistem politik. Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1985), 90-1.

⁵ Parsudi Suparlan, "Paradigma Naturalistik Dalam Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya", dalam *Antropologi Indonesia* No. 53 (Jakarta: UI Pres, 1998), 16.

kemudian diperlakukan secara *holistic* dan *sistemik*, yakni antara suatu gejala atau fenomena senantiasa dikaitkan dengan gejala lainnya sebagai sebuah kesatuan yang bulat dan menyeluruh.

Selanjutnya, data dianalisis memakai pendekatan sosiologi-politik yang gejala hubungan atau partisipasi tarekat dalam politik kekuasaan akan dikaji dari dimensi sosiologisnya, yaitu sampai seberapa jauh tarekat memainkan peranan yang signifikan dan berpengaruh kepada ekspresi aktualitas penganutnya, dengan membuat pola dan perilaku dalam aktivitas politik yang mereka mainkan. Lain dari itu, sebagai suatu perkumpulan, tarekat menampung berbagai jaringan (*network*) dan kepentingan para anggotanya, baik di antara sesama di lingkungan mereka sendiri (*internal*) maupun hubungannya dengan pihak luar (*eksternal*), maka data-data juga didekati (*approach*) menggunakan teori konflik dan integrasi. Karena secara teoritis, dalam setiap interaksi terdapat dua aspek tersebut. Namun untuk membatasi analisis dan untuk mencegah terjadinya komplikasi, penelitian akan cenderung kepada salah satunya saja.

Partisipasi Politik Penganut Tarekat *Qadriyah Wa Naqsyabandiyah* Rejoso

Apapun terminologi yang diberikan, apakah politik diartikan sebagai aktivitas untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan suatu keputusan, ataupun berarti segala kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan, atau sebaliknya meruntuhkan suatu kekuasaan, sejarah mencatat bahwa kaum tarekat senantiasa terlibat di dalamnya. Partisipasi politik yang dimaksudkan, misalnya, bisa dilihat sekurang-kurangnya pada keikutsertaan mereka dalam kegiatan-kegiatan berikut: penyelenggaraan Pemilu, kampanye, menjadi anggota legislatif, dan semacamnya. Dalam contoh kasus TQN Rejoso, dapat dikemukakan fakta-fakta berikut. Sebagai kekuatan yang dominan dalam sistem politik Orde Baru melebihi dari pada dua Organisasi Peserta Pemilu (OPP) lainnya, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai demokrasi Indonesia (PDI), Golongan Karya (Golkar) tampaknya sangat menyadari potensi politik tarekat sebagaimana diuraikan di muka. Sejak tahun '70-an partai pemerintah itu mulai serius merekrut komunitas Muslim tradisional tersebut dengan memberikan perhatian kepada para guru atau elite tarekat yang mempunyai pengaruh besar terhadap konsentrasi masyarakat Muslim. Regim Orde Baru pun makin aktif melakukan kampanye ke pondok-pondok dan sentra-sentra tarekat sambil menebar berbagai fasilitas dan donasi finansial berupa

bantuan uang jutaan rupiah. Memang, kucuran uang yang demikian besar itu secara eksplisit tidak mengikat atau tidak disertai permintaan resmi, agar penerimanya menyalurkan dukungan politik kepada pihak pemberi, yang dalam hal ini pemerintah atau Golkar, sehingga beberapa pesantren atau pusat tarekat mau menerimanya dengan tetap mempertahankan netralitas pendirian politik mereka, seperti sikap yang diambil oleh pesantren modern Gontor Ponorogo. Tetapi bagi sebagian besar kalangan, sumbangan tersebut memang tidak lain diberikan dengan tujuan menarik simpati penerimanya yang pada ujung-ujungnya diminta secara “sukarela” untuk memenuhi kepentingan politik si pemberi.

Salah satu tarekat yang dengan senang hati membuka tangan untuk bekerjasama adalah TQN Rejoso di bawah pimpinan Musta'in Romli. Dalam pada itu, Musta'in yang meneruskan kedudukan ayahnya sebagai petinggi tarekat, menarik gerbong organisasi yang dipimpinnya untuk bekerjasama dengan Golkar. Sebelum meraih puncak kariernya tersebut, sejak tahun 1960-an dengan mengatasnamakan koneksi ayahnya, Musta'in sudah mulai membangun relasi dengan kalangan penguasa dan militer di Jakarta yang pada 1963 rela mengulurkan bantuan yang murah hati untuk rencana pembangunan Universitas *Darul Ulum* di tengah kota Jombang. Setelah Orde Baru berkuasa, hubungan baik itu tetap dipelihara, dan secara perlahan-lahan menyeret semakin dekat, sampai akhirnya benar-benar bergabung ke Golkar pada Pemilu 1973. Agaknya sebagai sebuah lembaga atau organisasi yang puncak struktur kepemimpinannya bertumpu pada sang guru pembimbing dengan kepatuhan total dari para pengikutnya, selain untuk keperluan yang lebih luhur selaku sarana bagi peningkatan spiritualisme, tarekat bisa saja dimanfaatkan untuk berbagai tujuan menurut kemauan (motivasi), orientasi, dan artikulasi dari pemimpin tarekat yang bersangkutan secara pribadi.

Dengan begitu, Musta'in bersama TQN yang dipimpinnya semakin mempunyai akses yang lebih luas ke elite politik dan penguasa, baik pusat maupun daerah. Hubungan yang cukup erat ini tentu saja melimpahkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pihak pertama, tarekat secara kelembagaan memperoleh manfa'at; yaitu di samping dengan bangga dapat menjadi sarana melalui mana bermacam fasilitas bisa dinikmati oleh para pengikutnya, beberapa anggota tarekat Rejoso dan orang-orang dekat atau kepercayaan Musta'in diangkat menduduki pos-pos penting dalam birokrasi, bahkan tidak sedikit para elite tarekat terpilih sebagai wakil rakyat di parlemen tingkat daerah maupun pusat.

Sedangkan pihak kedua, penguasa dengan antusias menyambut kantong-kantong suara yang ditawarkan oleh TQN Rejoso, sebagai dukungan yang sangat signifikan untuk kemenangan politiknya. Hingga pada suatu saat tertentu, tarekat telah benar-benar menyediakan diri menjadi saluran dan sarana yang terbukti efektif dalam mensosialisasikan program-program pemerintah. Di dalam acara-acara ritual ketarekatan, di daerah maupun di pusatnya Rejoso, pimpinan TQN Rejoso terlihat selalu menggunakan setiap kesempatan untuk berkampanye bagi kemenangan Golkar di lingkungannya, setidaknya memuji kebijaksanaan pemerintah. Kesaksian beberapa orang informan menegaskan berikut, "Tampak seakan-akan *kyai* (guru tarekat) ingin masuk ke dalam "buku-baik" pemerintah, karena hampir tanpa kecuali mereka memberikan pujian yang agak berlebihan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan keagamaan pemerintah. Sepanjang pengajian umum, sikap penguasa banyak dinilai sebagai tindakan yang benar, adil, dan cocok bagi Islam".⁶ Atas nama pemerintah, misalnya, para pemimpin TQN Rejoso juga ikut mempropagandakan program "REPELITA" (Rencana Pembangunan Lima Tahunan), khususnya pembangunan di bidang mental spiritual. Persoalan yang sering mengganjal adalah ternyata tidak semua kebijakan pemerintah dapat dijelaskan menurut persepsi keagamaan para anggota-pengamal tarekat, terutama program Keluarga Berencana (KB). Mayoritas dari mereka ini umumnya tidak dapat menerima langkah pemerintah tersebut, tetapi tidak berani menentang secara terus terang, karena mereka khawatir dituduh melawan pemerintah. Terkadang bila mereka ditanya apakah setuju KB? Biasanya jawaban yang mereka berikan merupakan sesuatu yang masih kabur, seperti jawaban; "Tuhan telah menjamin kehidupan kita, maka biarkanlah mereka lahir ke dunia, *toh* itu sudah kehendak Tuhan jua".⁷

Terdapat alasan yang cukup kompleks mengapa Musta'in demikian gigih nyaris tidak menghiraukan resiko seperti pengucilan dan sebagainya-- untuk menyalurkan pilihan pribadi dan TQN yang dipimpinnya kepada Golkar. Selain terdorong oleh motivasi yang bemuansa kekuasaan, ternyata realitas kehidupan yang dialami sang tokoh secara psikologis agaknya merupakan faktor yang dia pertimbangkan dalam *preferensi* keputusan tersebut. Misalnya seperti kenyataan berikut. Sebagai salah satu

⁶ Wawancara, 12-9-1998

⁷ Wawancara, 12-12-1998

dari empat pesantren di Jombang yang paling berpengaruh,⁸ dan menjadi “bibit” NU, Rejoso adalah satu-satunya yang belum pernah memperoleh kedudukan tinggi melalui fasilitas NU, baik dalam tubuh organisasi Bintang Sembilan itu, maupun dalam jabatan pemerintahan/ negara. Sementara itu, tokoh yang pernah menjadi Rais Aam dalam organisasi NU adalah Hasyim Asy’ari dari pondok Tebuireng, Wahab Hasbullah dari Tambakberas, dan Muhammad Bisri Syamsuri dari pesantren Denanyar. Sementara itu, dua pemuka pesantren Jombang yang pernah menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan sebagai Menteri Agama, adalah Abdul Wahid Hasyim dari Tebuireng dan Wahib Wahab dari Tambakberas. Sedangkan Rejoso tidak pernah melahirkan tokoh dalam bidang politik maupun pemerintahan yang mampu mencapai jabatan setinggi itu. Mustain Romli sudah tentu seorang kyai besar dan temama, tetapi bidangnya adalah tasawuf, tepatnya sebagai pimpinan tertinggi TQN. Terhadap kondisi demikian, Mustain secara pribadi pernah membisiki Nurcholish Madjid, katanya; “Saya *toh* tidak dapat menitipkan amanat pesantren Rejoso kepada orang-orang Tambakberas atau Tebuireng yang ada di pusat itu! Maka saya harus berjalan sendiri, menembus ke pusat sendiri!”⁹

Kemesraan Musta’in dengan penguasa politik terus dipelihara dan dilanjutkan oleh para penerusnya. Rifa’i Romli, sang adik dan pengganti kedudukan Musta’in, yang sejak 1991 relatif berhasil mengembalikan kebesaran TQN Rejoso setelah menderita resistensi yang luar biasa, selalu menegaskan bahwa tarekat asuhannya tidak pernah ragu-ragu terhadap jejak Orde Baru dan Golongan Karya.¹⁰ Begitu pula sepeninggal Rifa’i, adiknya, Dimiyathi, melanjutkan estafet tradisi dukungan kepada partai pemerintah tersebut dengan mengeluarkan maklumat-maklumat politik yang tak kalah nyaringnya. *Murshid* yang juga dosen IAIN Surabaya serta mantan anggota dewan dari fraksi Karya di DPRD I Jawa Timur ini menjelang Pemilu terakhir di masa Orde Baru, bahkan telah menerbitkan fatwa yang mewajibkan setiap *murid* TQN memilih Golkar. Meskipun demikian, Dimiyathi menolak jika *support*-nya ke partai Golkar dikatakan

⁸ Tiga pesantren besar lainnya di Jombang ialah Tebuireng dengan tokohnya, Hasyim Asy’ari (pendiri dan Rais ‘Am; pemuncak legitimasi, NU), Tambakberas bersama Wahab Hasbullah (pendiri dan ketua PB NU), dan Denanyar dengan Bisri Syamsuri (Rais ‘Am NU).

⁹ Nurcholish Madjid, *Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang* (Jakarta: Bulletin PPAS No.6 1979), 80.

¹⁰ *Jawa Pos*, 3-8-1998.

hanya melestarikan warisan para pendahulunya. Ia memiliki argumentasi tersendiri mengenai sikapnya tersebut, yaitu bahwa Golkar dinilai sebagai satu-satunya kekuatan politik yang layak "ditipti" untuk perjuangan agama Islam dan umatnya. Kata Dimiyathi; "Golkar mempunyai dana yang cukup besar untuk meraih tujuan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semuanya memiliki satu tujuan yang sama, yakni mencari ketentraman, ketenangan, dan kemakmuran di dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara".¹¹ Dengan ungkapan lain, Dimiyathi mengakui bahwa dukungannya kepada Golkar semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan umat dan agama Islam. "Saya mengumpamakan Golkar itu laksana sebuah kapal besar", kata Dimiyathi bertamsil, "jadi kalau dikendarai umat Islam tidak akan mudah karam. Berbeda dengan kapal-kapal karet yang sangat mudah tenggelam kalau penumpangnya terlalu berat". Selanjutnya ia berkata: "Golkar mempunyai dana yang cukup besar untuk memperjuangkan rakyat. Ini tentu menguntungkan umat Islam".¹²

Yang menarik dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan pada masa-masa menjelang tumbanganya Orde Baru adalah temuan-temuan berikut. Jika di level para pemimpin tarekat Rejoso hingga sekarang ini pun masih terus mewarisi pilihan politik pendahulunya, ternyata di tingkat akar rumput, yakni di kalangan para anggota-pengamal tarekat biasa, telah terjadi perubahan sikap politis yang cukup radikal. Suatu kenyataan bahwa meskipun elite tarekat ternyata sudah menetapkan suatu keputusan politik, tidak berarti serta merta para pengikut sama sejalan dengan perilaku politik para guru tersebut. Dengan demikian, aktifitas politik yang berlaku di tingkat atas tidak lagi mempunyai daya-ikat dan secara niscaya tidak mempengaruhi perilaku politik massa di bawahnya. Hal seperti ini agaknya berdampak pula pada keharusan *re-interpretasi* atas tradisi kepatuhan total pengikut *vis a vis* guru dalam konteks ketarekatan. Banyak kalangan menyikapi persoalan politik kekuasaan adalah domain lain yang berbeda atau bahkan berlawanan dengan dimensi tarekat. Karena itu, dari data-data lapangan tergambar jelas aneka ragam partisipasi politik *ahl al-tariqah* Rejoso sesuai latar belakang dan status sosialnya masing-masing, setidaknya terdapat tiga macam kategori.

Pertama, anggota/ pengamal yang secara fanatik mengikuti apa pun sikap politik para elite dan pemimpin tarekat, termasuk dukungan

¹¹ *Ummat* No. 24/ 26-5-1997

¹² *Ibid.*,

kepada Golkar. Mereka merupakan orang-orang yang secara tradisional memegang prinsip “*sami'nâ wa aṭa'nâ*” (kami mendengar dan mentaatinya) terhadap segala *amalan* (apa yang dilakukan) guru-pembimbing. Tergabung ke dalam golongan ini pula sekelompok orang yang disebabkan tuntutan pekerjaan maupun lingkungan kehidupannya, dengan tanpa berpikir panjang menerima segala intruksi *murshid*. Mereka ini adalah para pengamal tarekat yang secara sosial datang dari lapisan kelas menengah, *well educated*, dan kaum professional, tetapi kering atau haus spiritualisme; seperti pegawai pemerintah/ swasta, tentara, guru/ dosen, dan sebagainya. Anehnya, meskipun kepatuhan itu bukan dilandasi oleh motivasi atau keyakinan religius, kelompok ini sangat suka mencari-cari justifikasi agama untuk sikap politik tersebut, sekurang-kurangnya sebagai bukti dedikasi *murid* kepada sang guru rohani. Seorang pejabat di kantor kabupaten, yang juga salah seorang *khalifah* TQN Rejoso untuk suatu wilayah di Jawa Timur bertutur panjang lebar kepada peneliti. Kata-katanya kurang lebih sebagai berikut, “Pada Pemilu yang baru lalu (1997), saya di-*dapuk* (Jawa, artinya “dipercaya”) menjadi juru kampanye (jurkam) bagi kemenangan Golkar di daerah saya, Nganjuk. Ketika berbicara di depan masyarakat calon pemilih, yang tidak sedikit di antara mereka itu adalah pengamal TQN Rejoso, maka saya tak segan-segan mengutip beberapa pernyataan *murshid* mengenai kewajiban *murid* mengikuti perilaku guru dan mematuhi segala titahnya, termasuk dukungan beliau kepada partai pemerintah. Memang saya merasa memperoleh keuntungan dengan keadaan ini, tetapi jujur saja harus saya katakan: sesungguhnya persoalan pilihan politik merupakan hak masing-masing orang atau warga negara. Saya sendiri “nyoblos” Golkar lebih disebabkan posisi saya di instansi pemerintah”. Ungkapan dengan kandungan materi yang serupa banyak peneliti temukan dalam investigasi terhadap kaum tarekat terdidik lainnya. Bapak Sujono (45) –bukan nama sebenarnya, seorang pengamal tarekat yang perwira Angkatan Laut misalnya, merasakan amat senang pada keputusan *murshid* yang bernaung di bawah rimbun “pohon beringin”. Karena dengan itu, ia tidak akan menghadapi kontradiksi dengan kolega dan lingkungan pekerjaannya, sementara ia tetap dapat mengikuti ritual ketarekatan dengan khusyuk. Begitu pula halnya Maemunah, SH. (40) –juga nama samaran, aspirasinya disalurkan ke Golkar bukan lantaran pengaruh langsung dari guru tarekatnya, meskipun ia sendiri tergolong pengamal yang aktif, melainkan lebih lantaran rasa tanggung jawabnya selaku pengurus organisasi wanita, dan istri dari seseorang yang tengah menduduki posisi

yang cukup prestisius di kantor kedinasannya. “Tetapi syukurlah”, puji Ibu Mun, “kyai (maksudnya, *mursyid*) sungguh arif. Beliau tidak hendak memasung tarekat menjadi sangkar emas, yang hanya boleh dimasuki kalangan tertentu. Jadi, *sekalian* saja kegiatan-kegiatan saya di panggung politik praktis, saya diniatkan juga sembari mematuhi perintah guru”, tandasnya mantap.

Kedua, kelompok yang seolah-olah tidak memperdulikan perilaku politik para elite tarekat. Mereka yang terdiri dari para pengamal tradisional dan umumnya datang dari lapisan awam ini sebegini besarnya telah berusia tua sehingga diduga sudah tidak lagi tertarik atau memiliki kepentingan materi (duniawi), dan agaknya memang hanya menghendaki peningkatan rohani (ibadat) dengan amalan tarekatnya itu. Informasi yang digali dari orang-orang seperti mbah Kamilah (65); seorang yang telah *sumeleh* tapi tetap kelihatan energik (Jawa: *ethes*) barangkali mewakili kecenderungan kedua ini. Kamilah menjelaskan kepada siapa aspirasi politiknya diberikan; “Mbah yo tetap nyoblos NU nak, dulu. Sekarang Ka’bah (maksudnya, PPP) nomer satu”. Juga menurut Ahmad; seorang *modin* (perangkat desa yang mengurus soal keagamaan) sekaligus kyai tingkat desa, perihal partisipasi politik adalah masalah pribadi. “Sebagai warga *Nahdliyin*”, tegas Ahmad, “saya kira wajib manut NU”. Tetapi Ahmad menolak keras tatkala peneliti mencoba menjelaskannya kepada bahwa hal itu bisa dituduh kontradiktif dengan perilaku politik guru TQN, sehingga sikap Ahmad dan kawan-kawannya yang seperti itu adalah sama artinya dengan suatu aksi “penentangan” atau mangkir dari keteladanan dan perintah sang guru. “*Loh, ya ndak sih*” tukas Ahmad agak keberatan. Selanjutnya, malah ia balik menyerang peneliti; “*Begini, sampeyan* jangan campur adukkan antara tarekat dengan politik. Tarekat itu ngurus *ngibadah, ya ukhrawi* saja. Sedangkan politik itu untuk hidup sekarang di dunia ini, *duniawi*”. Pak kyai itu lalu mengemukakan contoh perbandingan; “Kalau *sampeyan* butuh KTP (Kartu Tanda Penduduk) misalnya, maka *sampeyan* datang ke kantor desa. Bukan mengurusnya di ‘n-Joso’ sini”. Kata “nJoso” maksudnya ialah pondok Rejoso yang menjadi pusat induk TQN. Apalagi sepanjang ingatan kyai Ahmad, yang ternyata juga diamini oleh banyak anggota lainnya adalah kenyataan bahwa sang *murshid* dengan sangat bijaksana tidak pernah sekalipun berbicara masalah politik praktis di forum pengajian *khusûsiyât* (ritual rutin dalam tarekat). Seperti yang pernah terjadi, jika menyinggung persoalan kenegaraan, Pemilu, dan semacamnya, itu beliau lakukan di arena atau

podium politik, seperti di panggung kampanye partai, dan hal ini berkaitan dengan pencalonannya sebagai anggota dewan.

Ketiga, golongan anggota tarekat yang tidak dapat secara tegas dikategorikan ke dalam dua kelompok di atas. Mereka yang jumlahnya relatif kecil ini paling tidak mempunyai ciri-ciri sebagaimana sikap yang dipertontonkan Imam Sibaweh; seorang tokoh agama asal Bojonegoro dan menjadi *badal* Rejoso. Dia tidak pernah mempersoalkan kebenaran fatwa politik tertentu dari *murshid*. “Fatwa politik itu wajar-wajar saja”, ujar Imam, “toh, saya ini cuma *murid*, saya percaya apa-apa yang difatwakan kyai tentu tidak akan pernah menjerumuskan pengikutnya”.

Secara sosiologis, pengelompokan tersebut di atas, seperti terlihat di *site* penelitian ternyata tidak menimbulkan dampak negatif berupa *disharmoni* atau keretakan hubungan di antara sesama anggota maupun antara anggota tertentu melawan para elit-guru tarekat. Apalagi sampai mengundang konflik Setidak-tidaknya penilaian ini menurut penglihatan sekarang. Pada skala nasional, keadaan yang kondusif ini seperti diakui oleh banyak anggota TQN merupakan hasil yang monumental dari keputusan Muktamar NU di Situbondo (1985) yang mengembalikan garis-garis perjuangan organisasi Muslim tradisional itu ke semangat “Khittah 26”. Dalam lapangan politik, hal tersebut telah berhasil memutus arangan seluruh warga Nahdliyyin dan organ (*neven*) di bawah NU dari ketergantungan dukungan kepada orsospol tertentu, serta memungkinkan secara bebas setiap anggota NU membangun hubungan yang lebih positif dan saling menguntungkan dengan pihak mana pun tanpa merasa khawatir akan ditimpa sangsi sebagaimana pengalaman Musta’in dahulu, yang menderita isolasi dari para pengikutnya sendiri dan dari prasangka masyarakat umum.

Dengan demikian, bersandar pada pengelompokan perilaku politik di muka, partisipasi politik anggota TQN Rejoso tidak tepat jika hanya dipandang dari satu sudut politis serta tingkat keberagamaan (penguasaan ilmu agama dan kadar kesalehan formal) belaka.¹³ Realitas dan dinamika sosial sekarang memang sudah selayaknya melibatkan berbagai ragam variabel seperti pekerjaan, tingkat ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Menurut analisa para ahli, faktor-faktor tersebut pada gilirannya mampu mendorong perubahan pola-pola hubungan tradisional di lingkungan *ahl al-ṭarīqah* ke arah *trend* baru yang mereduksi alasan-alasan emosional

¹³ Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan Perilaku Politik* (Jakarta: Rajawali, 1989), 177.

yang semula melekat erat pada sikap-sikap politik keumatan. Akibatnya, pergulatan posisi politis kini acapkali berlangsung antara anggota-pengikut tarekat di satu pihak berhadapan dengan pimpinan mereka (*murshid*) di pihak lainnya. Elite mendukung aktif suatu kekuatan politik tertentu, sementara secara berlawanan kalangan bawah memberikan *support* terhadap partai lainnya.

Gambaran polarisasi politik *ahl al-tariqah* tersebut juga mengindikasikan bahwa hubungan kedua belah pihak, yaitu *murshid* (elite tarekat) dan *murid*, yang dahulu dirajut oleh ikatan emosi keagamaan yang kuat semakin mencair, karena bagaimana pun interaksi sosial antar keduanya kini mulai memasukkan pelbagai pertimbangan dan motivasi-motivasi yang bersifat rasional. Pertalian emosional yang pada kurun 1970-an ke bawah menjadi basis solidaritas dan identitas kaum Muslim secara keseluruhan, sekarang menjadi melemah untuk mencari bantuan baru. Umat sebagai kesatuan sosial pun, melebur pula bersama semakin pudarnya pertalian keagamaan tadi. Maka, konsepsi politik yang semula secara ketat diturunkan langsung dari teori-teori agama bergeser ke arah konseptual yang lebih variatif berdasar pada realitas kemasyarakatan, ekonomi, dan sebagainya.¹⁴

Penilaian Terhadap Keterlibatan *Ahl al-Thariqah* dalam Politik.

Sufisme atau tarekat barangkali keberadaannya dianggap sebagai suatu kontradiksi dalam dunia politik. Nyatanya, hubungan antara dunia agama (spiritual) dengan kekuasaan politik (sekular) seringkali menjadi problem yang sangat tipikal dalam sejarah tasawuf. Di satu sisi, orang cenderung beranggapan bahwa seseorang yang menekuni tasawuf tidak semestinya mendekati perkara duniawi dan kekuasaan, karena hal itu bertentangan dengan dimensi asketis yang dijalaninya. Meskipun dalam persoalan ini, para sufi memang kemudian harus berani menanggung konsekwensi-konsekwensi; seringkali dituduh sebagai a-politis, cenderung pasif, serta terisolasi dari realitas masyarakatnya. Kesalahan interpretasi seperti ini tentu saja pada gilirannya cepat atau lambat akan mengakibatkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap citra komunitas sufi (termasuk ajaran tasawufnya) tidak lagi menjadi *centre of power*, lebih-lebih *centre of exelence*. Sementara itu, di sisi lain, terdapat suatu

¹⁴ Fachry Ali, "Pasang Surut Peranana Politik Ulama" dalam *Prisma* No. 24 (Jakarta: LP3ES, 1984), 21.

ekspektasi kepada para politikus dan pemegang kekuasaan umumnya untuk selalu mendapat bimbingan para sufis (dan agamawan) dalam menjalankan tugas-tugas politik dan kekuasaannya. Sejarah mencatat, bagaimana para sufi memperlihatkan sikap yang pro-aktif dalam konteks sosial politiknya (*high politics*) sehingga relatif mampu mempengaruhi suatu kebijakan politik.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali umat dibuat bertanya-tanya jika ada tokoh tarekat yang sudah *sepuh*, sangat dihormati, tidak kurang suatu apapun (baik kekuasaan, kehormatan, dan kesejahteraan), serta sudah menanggalkan kepentingan duniawi dan tampaknya hanya memerlukan kebutuhan ukhrawi saja, kemudian tiba-tiba terlihat memakai jaket atau atribut sebuah partai politik. Banyak orang sufi direkrut ke dalam politik, setidaknya untuk tujuan menjaring massa (*vote getter*). Partai politik tentu amat senang kepada potensi komunitas ini, selain dapat menjaring suara maksimal dari massa Muslim, juga sesungguhnya mereka dianggap tidak tahu menahu perihal politik, sehingga urusan keduniaan lebih banyak diserahkan kepada para politisi. Dengan demikian, keterlibatan *ahl al-ṭarīqah* dalam politik tampaknya masih merupakan sesuatu yang masih kontroversial. Tidak terkecuali TQN Rejoso; ketika sang pucuk pimpinan dengan membawa-serta (mengatas- namakan) organisasi tarekat dan para anggota-pengamalnya terjun secara intensif ke dalam aktivitas politik nasional. Di kalangan para pengamal tarekat itu sendiri (internal) maupun di tengah-tengah masyarakat umum (non anggota) terdapat tanggapan pro dan kontra yang sulit dipertemukan. Bahkan jika tidak terkendali, perbedaan tersebut dapat saja membelah tarekat menjadi kubu-kubu atau *firqah* yang saling berseteru, seperti pernah terjadi dalam sejarah TQN Rejoso di masa silam.

Apa yang sebenarnya paling meresahkan dari aktifitas politik yang dilakukan oleh para petinggi TQN Rejoso adalah persoalan yang seringkali masih kabur, terutama dalam hal mendudukkan substansi tarekat yang mengurus soal-soal ritual dan keluhuran budi, dengan ambisi politik atau interest pada kekuasaan. Pak Sudjadi (60); seorang guru dan simpatisan partai nasionalis, misalnya, menyayangkan perkumpulan tarekat yang terlalu sibuk dengan do'a-do'a dan selalu mencampur adukkan agama dengan politik. "Saya sendiri seorang Muslim, namun saya tidak suka jika agama dicampur adukkan dengan politik". Ia kemudian menyebut beberapa aktifis yang menurutnya aktif dalam TQN Rejoso hanya karena mereka ingin-car jabatan atau posisi di jajaran birokrasi. "Beragama adalah menganjur-

kan orang untuk berbuat baik, bukan justru menggunakannya untuk mendapatkan kedudukan”, gumamnya agak sinis.¹⁵

Target-target duniawi seperti perolehan kursi di lembaga legislatif maupun eksekutif, kucuran fasilitas negara, dan sebagainya, meskipun seringkali dibungkus dengan kemas moralitas sufistik, menurut banyak informan yang dijumpai peneliti di lapangan, merupakan faktor-faktor yang mengundang antipati atau sikap kontradiktif di masyarakat. Mereka umumnya tidak setuju, misalnya, pada pernyataan-pernyataan politik KH. As'ad Umar dalam sebuah acara Halal Bi Halal TQN di kompleks pondok Darul Ulum Rejoso yang dihadiri Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) kala itu, Ir. Akbar Tanjung, dan pejabat-pejabat dari gubernuran dan kabupaten.¹⁶ Ketua Majelis Pengasuh Pondok dan pemuka TQN itu dengan terus terang mengajak warga tarekat untuk mencoblos tanda gambar Golkar pada pemilihan mendatang. “Kalau ikut orang sekalian yang kuat dan kaya saja”, pidato As'ad yang disambut gemuruh hadirin. Lalu ia mengambil ibarat,; “Nabi Muhammad saat akan menikah sengaja memilih Khadijah karena kekayaannya. Tujuannya agar harta itu dapat digunakan untuk membiayai perjuangan demi kemajuan agama Islam”. “Kita juga demikian, dukunglah Golkar yang kuat, demi kebaikan umat!”, lanjut As'ad berapi-api penuh agitasi.

Bagi pihak-pihak yang tidak sepakat dengan sikap As'ad tersebut, pemihakan politis seperti itu lalu dimaknai tidak lebih dari sekedar akal-akalan para pemimpin tarekat saja, yang berambisi meraih akses kekuasaan yang luas. Sama sekali tidak didorong oleh keikhlasan semata-mata karena Allah (*li al-Allâh ta'âlâ*) serta demi keluruhan agama Islam. Dan ironisnya, hal tersebut dilakukan tidak juga untuk memenuhi kepentingan organisasi. Karena *toh* sebagaimana yang disaksikan di lapangan, bahwa kebanyakan anggota tarekat adalah orang-orang yang telah berusia lanjut dan tidak lagi mempunyai keinginan mengejar kehidupan materi sebagai dasar utama meraih kebahagiaan.¹⁷

Meskipun mendapatkan reaksi negatif dan resistensi dari masyarakat, “politik praktis”, yaitu praktek politik yang dikelola untuk meraih tujuan-tujuan pragmatis yang berjangka pendek, seperti memperoleh

¹⁵ Wawancara, 10-8-1998

¹⁶ *Ummat* No. 24/ 26-5-1997

¹⁷ Penelitian lapangan terhadap pengikut tarekat di Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh Zamahsyari Dhofir juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Lihat Zamahsyari Dhafir, *Tradisi...*, 139.

berbagai kemudahan dan fasilitas, sumber daya dan dana/ finansial, wewenang dan kekuasaan –sebagaimana indikasinya sedikit banyak tampak pada perilaku politik para elite TQN Rejoso— sesungguhnya dari sudut sosiologis hal itu sah-sah saja dan termasuk perkara yang *predictable*. Alasannya, ketika sumber daya manusia dan dana yang tersedia sangat terbatas di lingkungan sosialnya, maka tentu bisa dimaklumi bila para tokoh tarekat lalu tergoda untuk mencari fasilitas di lintas sektoral (maksudnya, di luar bidang garapannya) dan mengesampingkan tuntutan politik dalam prespektif jangka panjang, yaitu politik yang menghendaki adanya proses pendidikan yang relatif lama, sehingga menghasilkan kesadaran tinggi dari semua anggota masyarakat atas hak dan tanggung jawabnya. Visi dan orientasi demikian belakangan populer dengan sebutan *High Politics*.¹⁸

Belakangan, dalam memperlihatkan sikap pro-aktif menghadapi persoalan aktual sosial politik di lingkungannya, banyak tokoh tarekat menerjuni arena politik praktis yang berarti memperebutkan kursi, baik sebagai pemain langsung atau sekedar diperalat oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu. Keadaan ini secara relatif memperoleh pembenaran-pembenaran politis, utamanya berkenaan dengan perkembangan dua kecenderungan latar belakang.

Pertama, sehubungan dengan makin maraknya keinginan masyarakat akan “politik refresentasi”, yaitu problem keterwakilan umat Islam dalam struktur politik. Sudah menjadi fakta historis, bahwa kaum Muslim yang merupakan mayoritas dalam hitungan, kurang terakomodasikan dalam lingkaran kekuasaan yang ada. Untuk mengukur fenomena ini biasaya digunakan indikator sederhana, seperti memakai satuan-satuan statistik yang agak kasar demikian: jumlah Menteri di Kabinet, Dirjen dalam satu departemen, jumlah gubernur, Kabag di Dati I dan II, dan sebagainya. Di berbagai bidang itu, jumlah Muslim santri yang menduduki pos-pos tersebut sangat terbatas, setidaknya tidak mencerminkan “keterwakilan” umat Islam dalam hal kuantitas. Memang keterwakilan, menurut Dimiyathi, bisa juga mengenai kualitas, yaitu dalam hal ini pembinaan keagamaan secara intensif. “*Lha*, kalau semua umat Islam mem-back up ormas Islam, lalu siapa lagi yang akan membina sesama saudara kita umat

¹⁸ Lihat Hajrianto Y. Tohari, “High Politics, Kinerja Lama Formulasi Baru” dalam Hamid Basyaib dkk., *Kasus Amin Rais; Ada Udang di Balik Busang* (Bandung: Mizan, 1997), 150.

Muslim yang berada di Golkar dan pemerintahan atau birokrasi”, ujar pemimpin tertinggi TQN Rejoso itu.

Kedua, sehubungan dengan salah satu peran duniawi dari kaum ulama (dalam hal ini; *murshid*) sebagai *patron* umat Islam, yakni kegunaannya menjadi perantara (*mediator*) dalam menjalin komunikasi yang harmonis dengan wakil-wakil di luar komunitasnya, guna melindungi kepentingan pengikut dan institusinya.¹⁹ Fungsi penghubung yang mengemban kepentingan internal umat (anggota tarekat) di tengah-tengah sistem luar yang dominan memang merupakan bidang pekerjaan yang secara otoritatif dimiliki oleh para pemuka agama. Padahal dalam prakteknya, posisi perantara yang dimainkan para tokoh tarekat biasanya menemui persoalan-persoalan yang sulit diatasi. Di satu segi, elite yang berperan sebagai pelayan (*abdi*) bagi umat dan agamanya dituntut setiap waktu siap memberikan dedikasinya melulu kepada warganya itu, sementara di sudut lain, menerima intervensi luar yang kompleks sebagai cara untuk meraih kemaslahatan umat bisa mengakibatkan suatu pendangkalan atas otoritas pemuka agama itu di antara komunitasnya sendiri.

Penutup.

Dari keterangan di muka tampak jelas bahwa keterlibatan tarekat dalam politik dapat dipahami dengan melihat kedudukan organisasi tasawuf itu sebagai *trustee* masyarakat Islam tradisional yang pengikutnya (*murid*) mengharapkan bimbingan spiritual dari guru-guru mereka dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran kerohanian Islam. Dengan demikian, tarekat secara keseluruhan mempunyai kontribusi dalam mendefinisikan situasi aktual umat Islam, khususnya para anggota tarekat. Pendefinisian itu tentu menghasilkan suatu pandangan politik tertentu, yang pada gilirannya dapat melahirkan pola-pola partisipatif dengan karakteristik tertentu pula.

Dalam contoh kasus TQN Rejoso, pada dasawarsa yang silam dapat dikemukakan fakta-fakta berikut: tarekat semakin mempunyai akses yang lebih luas ke elite politik-penguasa, baik pusat maupun daerah. Sebetulnya dalam sejarah di hampir seluruh kawasan dunia Islam, gerakan tarekat senantiasa tak terpisahkan dari aktifitas politik. Di pentas politik Indonesia modern, keadaan itu terlihat sangat jelas dalam aktifitas dan perilaku politik para penganut tarekat, kendati sebagian besar mereka tidak

¹⁹ Hiroko Hirokoshi, *Kyai...*, 188.

secara terang-terangan menyatakan afiliasi kepada salah satu orsospol (organisasi sosial politik) tertentu itu bertumpu pada basis ketarekatan. Demikian pula, karena keikutsertaan *ahl al-ṭarīqah* dalam perebutan kekuasaan terkadang merugikan eksistensi perkumpulan kerohanian itu sendiri. Selain mengakibatkan tingkat apresiasi masyarakat terhadap guru tarekatnya bisa mengalami degradasi, hingga sang guru dianggap kurang berwibawa dan tereduksi cakupan pengaruhnya atas komunitas anggotanya juga dapat saja menimbulkan perpecahan dalam tubuh umat Islam secara menyeluruh, khususnya intern sesama kaum tarekat.